

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11 (2), 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Aristho Refo Putra & Evi Noor Afifah, 2024. “Dampak Wajib Belanja Terhadap Kemiskinan di Indonesia,” Makalah Ekonomi Gadjah Mada Seri 202407006, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik (2018-2024). Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022*. Jakarta: BPS.
- Bahar, Ujang. (2000). *Keuangan Daerah dan Otonomi Daerah di Indonesia*.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.
- Chambers, R. (2015). *Poverty and livelihoods*. Dalam Khomsan, A., dkk. (Ed.), Analisis Kemiskinan Multidimensi. Jakarta: Penebar Swadaya.
- DJPK. (2018–2024). *Laporan Realisasi Anggaran dan Transfer ke Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Elvira, S., dkk. (2018). Analisis Bentuk dan Sifat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(2), 115–129.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamuyad. (2008). *Konsep Kemiskinan dan Pengukurannya*. Dalam Khomsan, A., dkk. (Ed.), Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga.

- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2018). *Identifikasi Kemiskinan Multidimensi di Indonesia*. Dalam Mauna, A., dkk., *Kajian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial*.
- Hermawati, dkk. (2015). *Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Hestin, D., & Nurwani. (2017). *Kemiskinan sebagai Masalah Multidimensi*. *Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Iskandar, FA, & Bawono, ADB (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Sebagai Variabel (Studi Empiris Kabupaten / Kota Se-Pulau Jawa Tahun 2018 – 2020). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7 (2).
- Itang. (2015). *Faktor Penyebab Kemiskinan: Analisis Internal dan Eksternal*. *Jurnal Ekonomi & Sosial*.
- Jarnasy. (2018). *Kemiskinan Struktural dan Dampaknya terhadap Pembangunan Sosial*. Dalam Elvira, S., dkk., *Pembangunan dan Ketimpangan Sosial*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Program Pembangunan Kesehatan 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khomsan, A., dkk. (2008). *Pengertian dan Dimensi Kemiskinan*.
- Khomsan, A., dkk. (2010). *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga dalam Perspektif Multidimensi*.
- Mahi, A. K. (2021). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Evaluasi dan Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Mauna, A., dkk. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan: Perspektif Multidimensi*.
- Merna, K. (2011). *Akses Aset dan Kemiskinan di Negara Berkembang*.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill International.
- Nurias, N., Johari, SM, Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Mengurangi angka kemiskinan provinsi di Indonesia: Dampak belanja pemerintah daerah. *Jurnal*

Ekonomi & Studi Pembangunan, 24 (2), 297–315.
<https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18618>

- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sholeh. (2010). *Kemiskinan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Dalam Khomsan, A., dkk. *Kemiskinan Multidimensi dan Kebijakan Publik*.
- Suharto, E. (2017). *Kemiskinan dan Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Dalam Hestin & Nurwani, *Pembangunan Sosial*.
- Suryawati. (2018). *Jenis dan Dimensi Kemiskinan dalam Perspektif Sosial Ekonomi*. Dalam Elvira, S., dkk. *Kajian Kemiskinan Kontemporer*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. 11th Edition. Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Development Programme (1990). *Human Development Report*.